



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ADNAL YEKA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 699483

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.460.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 3.000 m<sup>2</sup>/240 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m<sup>2</sup>/108 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 705.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 755.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 228.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX 150 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 19.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 4.707.500.000

**III. HUTANG** Rp. 45.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.662.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : GESTAR RHEIDO  
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
3. NHK : 966086

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>130.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>140.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA HONDA MOBILIO MT TYPE S Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA NMAX NEO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.200.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.500.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>284.700.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>287.725.331</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>-3.025.331</b>

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
**UNIT KERJA** : KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MELI AFRITA  
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN  
3. NHK : 771870

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 160.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/11 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 99.000.000

1. MOBIL, SUZUKI AVI4F DX (4X2) MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000  
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000  
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 90.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 359.000.000

**III. HUTANG** Rp. 44.480.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 314.520.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.